



BERAGAMA DAN BERBANGSA BERDASARKAN NILAI- NILAI PANCASILA

Oleh : Siti Nuraini, M.Pd.I

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar Negara, Pancasila dalam kedudukan ini sering disebutkan sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (Philodosophische Gronslag) dari Negara ,ideologi Negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara.

Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini, dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan Sumber dari Segala Sumber Hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional yang mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsure-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan Negara.

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas krokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita- cita hukum. Sehingga merupakan sumber nilai, norma serta kaidah moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun Undang-Undang Dasar,maupun yang tidak tertulis atau convensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mengetahui, mempelajari, mendalami dan mengembangkannya serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Yang paling penting kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan merealisasikan



sebuah teori atau pengertian dari pancasila tersebut. Sehingga adanya penerapan Pancasila oleh diri kita di dalam masyarakat, bangsa dan negara, kita dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu.

KATA KUNCI

Beragama, Berbangsa dan Nilai- Nilai Pancasila

I. PENDAHULUAN

Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam di dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu.

Istilah nilai dalam bahasa Inggris "*value*" termasuk dalam bidang kajian filsafah. Sedangkan istilah nilai dalam falsafah digunakan untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya "keberhargaan" (*worth*) atau kebaikan "*goodness*". Dan kata kerja artinya sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Jika sesuatu bernilai, maka sesuatu tersebut berharga atau berguna bagi kehidupan manusia.¹

Terbentuknya nilai atas dasar suatu pertimbangan cipta, rasa, dan keyakinan seseorang, kelompok, maupun bangsa. Nilai bersumber dari kebudayaan yang memiliki fungsi untuk mendorong atau mengarahkan sikap serta perbuatan manusia. Nilai nilai pancasila di harapkan dapat membawa kemajuan dan kejayaan bangsa, negara dan agama. Pancasila merupakan pedoman luhur yang wajib di taati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera tentram, adil, aman dan sentosa

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para *founding fathers* ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa

¹Notonagoro. . *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila dengan Kelangungan Agama*, Cet. 8. Jakarta: Pantjoran Tujuh. 1980. H. 12



berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali.²

Pancasila sering digolongkan ke dalam *ideologi tengah* di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler.³

Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila bagaikan pendulum (bandul jam) yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah.

Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, kita sepakat mendasarkan diri pada ideologi

Pancasila dan UUD 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal.

Kebijakan ini berarti menggerakkan pendulum bergeser ke kanan. Pemerintah Indonesia menjadi pro Liberalisme. Deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekrit Presiden ini berartilah haluan politik negara dirubah. Pendulum yang posisinya di samping kanan digeser dan digerakan ke kiri. Kebijakan ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri.

Kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat (kapitalisme) dan pro ke Kiri dengan dibuatnya poros Jakarta-Peking dan Jakarta- Pyong Yang. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu tumbangny pemerintah Orde Lama (Ir. Soekarno) dan berkuasanya pemerintah Orde Baru (Jenderal Suharto).

² *Ibid*,

³ Leahy, Louis. "*Ideologi Tinjauan Historis dan Kritis*". Yogyakarta: dalam Majalah Basis No.42, 1993. H. 130 - 135.



Pemerintah Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan oleh regim sebelumnya dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru merubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi Kiri dan anti Barat menariknya ke posisi Kanan. Namun regim Orde Barupun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945, ia dianggap cenderung ke praktik Liberalisme-kapitalistik dalam mengelola negara.

Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbangnyaregim Orde Baru telah muncul 4 regim Pemerintahan Reformasi sampai saat ini. Pemerintahan-pemerintahan regim Reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru.

Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idilologi bangsa Indonesia, dewasa ini dalam zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama lebih dari lima puluh tahun.

Namun sebaliknya sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari ideology Negara dalam format politik orde baru banyak menuai kritik dan protes terhadap pancasila. Sejarah implementasi pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus bukan dalam pengertian keabsahan substansialnya, tetapi dalam konteks implementasinya. Tantangan terhadap pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya bersal dari faktor domestik, tetapi juga dunia internasional.

Zaman reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama Pancasila sebagai Paradigma dimaksudkan bahwa didalam nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.

Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat ada hakikatmya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pengimplementasi



Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan tersebut di rinci dalam berbagai macam bidang diantaranya dalam Bidang Politik, Ekonomi Hukum, Sosial Budaya, Kehidupan antar umat beragama dan Bidang Pertahanan dan Keamanan.

II. PEMBAHASAN

BERAGAMA DAN BERBANGSA

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Kehidupan Umat Beragama Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun, bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Indonesia adalah Negara yang majemuk, bhinneka dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa dan agama namun terjalin kerja bersama guna meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita.

Namun akhir-akhir ini keramahan kita mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan karena ada beberapa kasus kekerasan yang bernuansa Agama. Ketika bicara peristiwa yang terjadi di Indonesia hampir pasti semuanya melibatkan umat muslim, hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia

beragama Islam. Masyarakat muslim di Indonesia memang terdapat beberapa aliran yang tidak terkoordinir, sehingga apapun yang diperbuat oleh umat Islam menurut sebagian umat non muslim mereka seakan-seakan merepresentasikan umat muslim.

Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah seperti berikut:⁴

1. Semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas (ummatan wahidah).
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip:
 - a) Bertentangan yang baik
 - b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
 - c) Membela mereka yang teraniaya
 - d) Saling menasehati
 - e) Menghormati kebebasan beragama.

⁴ Sastrapratedja, M. *Pancasila dan Globalisasi*. Magelang: Panitia Seminar Nasional Pendidikan Pancasila di Universitas Tidar pada 29-31 Juli 1996. H. 7



Lima prinsip tersebut mengisyaratkan:

1. Persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama;
2. Pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.

Dalam "Analisis dan Interpretasi Sosiologis dari Agama" misalnya, mengatakan bahwa hubungan agama dan politik muncul sebagai masalah, hanya pada bangsa-bangsa yang memiliki heterogenitas di bidang agama.⁵

Hal ini didasarkan pada postulat bahwa homogenitas agama merupakan kondisi kesetabilan politik. Sebab bila kepercayaan yang berlawanan bicara mengenai nilai-nilai tertinggi (ultimate value) dan masuk ke arena politik, maka pertikaian akan mulai dan semakin jauh dari kompromi.

Dalam beberapa tahap dan kesempatan masyarakat Indonesia

yang sejak semula bercirikan majemuk banyak kita temukan upaya masyarakat yang mencoba untuk membina kerukunan antar masyarakat. Lahirnya lembaga-lembaga kehidupan sosial budaya seperti "Pela" di Maluku, "Mapalus" di Sulawesi Utara, "Rumah Bentang" di Kalimantan Tengah dan "Marga" di Tapanuli, Sumatera Utara, merupakan bukti-bukti kerukunan umat beragama dalam masyarakat.

Ke depan, guna memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia yang saat ini sedang diuji kiranya perlu membangun dialog horizontal dan dialog Vertikal. Dialog Horizontal adalah interaksi antar manusia yang dilandasi dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen.

Identitas indeterminis adalah sikap dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi manusia berada pada kemanusiaannya. Artinya, posisi manusia yang bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai manusia yang berkal budi, yang kreatif, yang berbudaya

⁵ Sudarmanto, JB. 1987. *Agama dan Ideologi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987. H. 87



Nilai-Nilai Pancasila

Istilah Pancasila berasal dari bahas Sansekerta, yaitu Panca, yang berarti lima dan Sila yang berarti asas, dasar, atau pokok. Pancasila dapat diartikan sebagai lima dasar atau lima asas. Dalam buku Sutasoma karya Mpu Tantular dan Negara Kertagama karya Mpu Prapanca terdapat istilah Pancasila yang ditulis dengan istilah Pancasila Krama. Istilah Pancasila yang digunakan bangsa Indonesia sebagai dasar negara pertama kali, yang merupakan usulan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI ketika merumuskan dasar negara Indonesia.⁶

Sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia adalah Pancasila yang berisi seperangkat nilai yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Pancasila yang berisi seperangkat nilai dari kelima sila sebagai berikut.⁷

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya

pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius dan bukan bangsa yang Ateis. Nilai Ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama dan tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif terhadap pemeluk agama lain.

Contoh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai berikut.

- a. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Membina adanya kerja sama dan toleransi di antara umat bergama kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- ### 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal

⁶ Koento Wibisono. 1988. *Pancasila Ideologi Terbuka*. Magelang: Panitia Temu Karya Dosen-Dosen PTN Se-Jawa Tengah dan Kopertis Wil.VI.

⁷ Notonagoro. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta: Universitas Pancasila. 1974. H. 45



sebagaimana semestinya. Contoh nilai “Kemanusiaan yang adil dan beradab” adalah sebagai berikut⁸

- a. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia.
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta mencegah terhadap segala pelanggaran HAM.
- c. Saling bekerja sama dengan bangsa lain, seperti dalam bidang ekonomi.
- d. Saling menghormati bangsa lain, tidak menghina dan tidak mengintimidasi.
- e. Tidak membeda-bedakan suku bangsa ras, agama, maupun warna kulit.

3. Persatuan Indonesia

Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa Nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki

bangsa Indonesia. Contoh nilai “Persatuan Indonesia” adalah sebagai berikut ini.⁹

- a. Bangga menjadi bangsa Indonesia
- b. Mewujudkan semboyan Bhineka Tunggal Ika
- c. Menempatkan persatuan dalam kepentingan bangsa Indonesia dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- d. Menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
- e. Memajukan pergaulan untuk persatuan bangsa.

4. Nilai Kerakyatan

Nilai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan yang dibentuk oleh pemerintah. Diharapkan lembaga-lembaga perkilian yang bentuk dapat meyalurkan

⁸ Slamet Sutrisno. *Pancasila sebagai Metode*. Yogyakarta: Liberty. 1986. H. 2

⁹ *Ibid*



aspirasi rakyat ke pemerintah. Contoh nilai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah sebagai berikut.¹⁰

- a. Kedaulatan Negara berada di tangan rakyat (demokrasi)
- b. Mengakui adanya kedudukan dan hak yang sama bagin semua warga negara Indonesia.
- c. Melaksanakan keputusan bersama secara penuh tanggung jawab dan niat yang baik.
- d. Pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran

5. Nilai Keadilan Sosial

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasr sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Nilai-nilai dasr tersebut bersifat abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan dan eksplisist,

perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah sebagai berikut.¹¹

- a. Menciptakan keadilan sosial dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia
- b. Adanya hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia
- c. Menjunjung tinggi sifat dan suasana gotong royong dengan penuh rasa kekeluargaan.
- d. Cita-cita masyarakat adil dan makmur serta mteriil dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia

Nah, dari beberapa keterangan di atas kita dapat mengetahui berbagai contoh nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Demikianlah Pancasila Sebagai Sumber Nilai Berbangsa dan Bernegara.

Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*



Alfred North Whitehead,¹² tokoh utama filsafat proses, berpandangan bahwa semua realitas dalam alam mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan, kreatif dan baru. Realitas itu dinamik dan suatu proses yang terus menerus “menjadi”, walaupun unsur permanensi realitas dan identitas diri dalam perubahan tidak boleh diabaikan. Sifat alamiah itu dapat pula dikenakan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas (pengada). Masalahnya, bagaimanakah nilai-nilai Pancasila itu diaktualisasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara? dan, unsur nilai Pancasila manakah yang mesti harus kita pertahankan tanpa mengenal perubahan?

Nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah:¹³

a. Pertama, *nilai dasar*, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat

amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

b. Kedua, *nilai instrumental*, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar

¹² Suwarno, P.J.. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1993. H. 76

¹³ Moerdino. “Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas”, dalam *Majalah Mimbar* No.75 tahun XIII.1996



yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

- c. Ketiga, *nilai praksis*, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan.

Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya. Bahkan Moerdiono menegaskan, bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi



antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Sudah barang tentu jika konsistensi ketiga nilai itu dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan ada masalah. Masalah baru timbul jika terdapat inkonsistensi dalam tiga tataran nilai tersebut.¹⁴

Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak-umum-universal itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual.¹⁵ Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi.

Driyarkara menjelaskan proses pelaksanaan ideologi Pancasila, dengan gambaran gerak transformasi

Pancasila formal sebagai *kategori tematis* (berupa konsep, teori) menjadi *kategori imperatif* (berupa norma-norma) dan *kategori operatif* (berupa praktik hidup). Proses transformasi berjalan tanpa masalah apabila tidak terjadi deviasi atau penyimpangan, yang berupa pengurangan, penambahan, dan penggantian.¹⁶

Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah diupayakan secara kreatif dan dinamik, sebab Pancasila sebagai ideologi bersifat futuristik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan.

Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praksis kemasyarakatan dan kenegaraan bukanlah masalah yang sederhana. Soedjati Djiwandono mensinyalir, bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati Negara Pancasila dalam berbagai seginya. Kiranya tidak tepat membuat "sakral" dan taboo berbagai

¹⁴ Moerdino "Masalah Filsafati dan Ideologi dalam Membangun Negara Hukum di Indonesia", dalam Majalah *Mimbar* No. 74 tahun XIII. 1995

¹⁵ Suwarno, P.J. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1993. h. 108

¹⁶ Suwarno. *Ibid*, H.110-111



konsep dan pengertian, seakan-akan sudah jelas betul dan pasti benar, tuntas dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi.¹⁷

Sikap seperti itu membuat berbagai konsep dan pengertian menjadi statik, kaku dan tidak berkembang, dan mengandung resiko ketinggalan zaman, meskipun mungkin benar bahwa beberapa prinsip dasar memang mempunyai nilai yang tetap dan abadi. Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan perubahan, baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin perlu dirubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa lagi mungkin perlu ditinggalkan.

Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan

adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Menggunakan pendekatan teori Aristoteles, bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dynamik).

Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Mirip dengan teori A.N.Whitehead, setiap satuan aktual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) terkandung daya kemungkinan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif, seperti batu yang dapat dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses ke-menjadi-an yang selanjutnya.

Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang

¹⁷ Soedjati Djiwandono, J. 1995. *Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah Pembaharuan*. Jakarta: CSIS.1995. H 2-3



keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila.

Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-4 yang berkaitan dengan negara, yang meliputi; wilayah, warganegara, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-3 yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang meliputi; faktor-faktor integratif dan upaya untuk menciptakan persatuan Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-1, ke-2, dan ke-5 yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan dan sosial ekonomis.¹⁸

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia yang juga merupakan landasan dalam berkehidupan di tengah masyarakat,

bangsa dan negara Republik Indonesia. Pancasila yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 ialah sebuah pandangan atau nilai yang mendalam serta menyuluruh mengenai bagaimana cara terbaiknya, yakni secara moral dianggap benar dan adil, mengatur perilaku bersama dalam segala sendi kehidupan nasional. Semakin dipahami dan dimaknainya Pancasila sebagai suatu landasan idiil diharapkan dapat menjadi suatu pengontrol perilaku masyarakat.

Maka warga negara Indonesia menjadikan pengamalan terhadap nilai nilai dasar Pancasila sebagai dasar perjuangan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berkenegara. Oleh karena itu pengamalannya harus diawali dari setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggaraan negara yang secara meluas akan berkembang menjadi sebuah pengamalan Pancasila sebagai kepribadian bangsa oleh setiap lembaga negara maupun lembaga masyarakat, baik yang berada dipusat maupun di daerah.

III. KESIMPULAN

Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam

¹⁸ Suwarno. *Op. Cit.* H. 126



kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warganegara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir.

Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan

dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal (self-renewal) dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warganegara dan warga masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrapratedja, M. *Pancasila dan Globalisasi*. Magelang: Panitia Seminar Nasional Pendidikan Pancasila di Universitas Tidar pada 29-31 Juli 1996
- Koento Wibisono. 1988. *Pancasila Ideologi Terbuka*. Magelang: Panitia Temu Karya Dosen-Dosen PTN Se-Jawa Tengah dan Kopertis Wil.VI.
- Leahy, Louis. *"Ideologi Tinjauan Historis dan Kritis"*. Yogyakarta: dalam Majalah Basis No.42, 1993
- Moerdino *"Masalah Filsafati dan Ideologi dalam Membangun Negara Hukum di Indonesia"*, dalam Majalah Mimbar No. 74 tahun XIII. 1995



- , "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas", dalam Majalah Mimbar No.75 tahun XIII.1996
- Notonagoro. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta: Universitas Pancasila. 1974.
- Notonagoro. . *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila dengan Kelangsungan Agama*, Cet. 8. Jakarta: Pantjoran Tujuh. 1980
- Slamet Sutrisno. *Pancasila sebagai Metode*. Yogyakarta: Liberty. 1986.
- Soedjati Djiwandono, J. 1995. *Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah Pembaharuan*. Jakarta: CSIS.1995.
- Sudarmanto, JB. 1987. *Agama dan Ideologi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.
- Suwarno, P.J. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.1993.